



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya-upaya *International Federation of Journalists (IFJ)*
dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Nasya Khaerunnisa

2016330194

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya-upaya *International Federation of Journalists (IFJ)*
dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki

Skripsi

Oleh

Nasya Khaerunnisa

2016330194

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Nasya Khaerunnisa
Nomor Pokok : 2016330194
Judul : Upaya-upaya *International Federation of Journalists* (IFJ) dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana, Ph.D..

: 

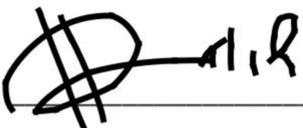
Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

: 

Anggota

Ratih Indraswari, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasya Khaerunnisa

NPM : 2016330194

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : **Upaya-upaya *International Federation of Journalists* (IFJ)
dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juli 2020



Nasya Khaerunnisa

ABSTRAK

Nama : Nasya Khaerunnisa

NPM : 2016330194

Judul Skripsi : Upaya-upaya *International Federation of Journalists* (IFJ) dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki

Pada tahun 2013 terjadi peristiwa krusial di Turki yang disebut dengan *Gezi Park* yakni adanya protes anti-pemerintah yang menggema di seluruh wilayah Turki, peristiwa tersebut menimbulkan dampak berupa ancaman terhadap jurnalisme independen atas munculnya sensor sepihak pada media selama protes anti-pemerintah itu berlangsung. Peristiwa tersebut memiliki dampak berkepanjangan pada kehidupan jurnalisme di Turki dan semakin memburuk saat adanya peristiwa kudeta terhadap Erdogan setelah menjabat menjadi Presiden Turki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya-upaya *International Federation of Journalists* dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki. Sebagai NGO yang bergerak dalam bidang jurnalistik terbesar di dunia, maka IFJ berupaya untuk mendorong kebebasan jurnalisme di Turki. Melihat adanya peristiwa tersebut, maka dibuat rumusan penelitian **“Bagaimana Upaya-upaya International Federation of Journalists (IFJ) dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki?”**. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan Teori Liberalisme Sosiologis yang menekankan pada hubungan transnasional antar individu dan kelompok yang penting untuk urusan global. Penulis akan menggunakan konsep peran NGO milik Lewis & Kanji dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan menggunakan konsep sembilan upaya NGO milik Karns dan Karen Mingst dalam menangani isu internasional. Penulis akan melakukan penelitian dengan mencari data deskriptif melalui studi pustaka dan literatur. Dari hasil analisis penulis menemukan empat kesimpulan bahwa upaya IFJ dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki dilakukan dengan cara menggalang Dana Solidaritas untuk digunakan dalam membantu aktivitas kebebasan jurnalisme di Turki, mengadvokasikan perubahan dalam kampanye dengan tagar #Journalismisnotacrime, merilis laporan mengenai kekerasan terhadap jurnalis di Turki, serta melaksanakan konferensi internasional untuk menjamin kebebasan pers dan hak pekerja jurnalis di Turki.

Kata Kunci: Turki, Kebebasan Jurnalisme, *International Federation of Journalists*, Upaya.

ABSTRACT

Name : Nasya Khaerunnisa

NPM : 2016330194

Thesis Title : *The International Federation of Journalists (IFJ) 's Efforts in Protecting Freedom of Journalism in Turkey*

In 2013 a crucial event occurred in Turkey called Gezi Park which is an anti-government protests that echoed throughout Turkey, the event had an impact in the form of threats to independent journalism over the emergence of self censorship of the media during the anti-government protests. The event had a prolonged impact on the life of journalism in Turkey and worsened when a coup d'état occurred against Erdogan after serving as President of Turkey. This study seeks to analyze the efforts of the International Federation of Journalists in protecting journalism freedom in Turkey. As an NGO engaged in the largest journalism field in the world, the IFJ seeks to encourage freedom of journalism in Turkey. Seeing this event, the research formulation was made "What are the Efforts of the International Federation of Journalists (IFJ) in protecting journalism freedom in Turkey?". To answer the research questions, the authors use the Theory of Sociological Liberalism which emphasizes transnational relationships between individuals and groups that are important for global affairs. The author will use Lewis & Kanji's NGO role concept in answering this research question. In addition, the writer will also use the concept of nine NGO efforts owned by Karns and Karen Mingst in dealing with international issues. The author will conduct research by finding descriptive data through literature and literature studies. From the results of the analysis the authors found four conclusions that IFJ efforts in protecting journalism freedom in Turkey were carried out by raising the Solidarity Fund to be used to assist journalism freedom activities in Turkey, advocating changes in the campaign with the hashtag #Journalismisnotacrime, releasing reports on violence against journalists in Turkey, and holding an international conference to guarantee press freedom and the rights of journalist workers in Turkey.

Keywords: Turkey, Freedom of Journalism, International Federation of Journalists, Efforts.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas bimbingan, berkat, dan rahmat-Nya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada tenggat waktu yang ditentukan dengan judul “*Upaya-upaya International Federation of Journalists (IFJ) dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki*”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini merupakan hasil analisis penulis mengenai upaya-upaya IFJ sebagai organisasi dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki yang terganggu atas adanya serangkaian peristiwa demonstrasi hingga upaya kudeta Presiden Erdogan yang terjadi dari rentang tahun 2012-2016. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melengkapi pemahaman mengenai kondisi jurnalisme di Turki beserta upaya-upaya yang dilakukan NGO IFJ dalam menangani kebebasan jurnalisme di negara tersebut.

Dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sukewarsini Djelantik sebagai Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan kritik, saran, serta solusi yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman penulis atas dukungan yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian. Akhir kata penulis meminta maaf apabila masih ditemukannya kekurangan dalam penulisan, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan.

Bandung, 6 Juli 2020

Nasya Khaerunnisa

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas bimbingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu untuk mencapai gelas S1 dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Tak henti- hentinya penulis untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa, semoga segala proses dan perjalanan penulis selama kuliah ini dapat membawa berkah di masa yang akan datang.

2. Terimakasih penulis ucapkan bagi orangtua dan keluarga, mamih, papih, abah, akang, dede terimakasih banyak untuk selalu ada untuk penulis, selalu support penulis apapun yang terjadi hingga hari ini, kalau engga ada mamah dan papih mungkin nasya engga akan mungkin ada dititik ini. Terutama doa mamah yang selalu mengiringi dan menguatkan nasya agar selalu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan selalu takut akan Tuhannya. Aku sayang kalian selamanya.

3. Kepada yang terhormat Mbak Sukewarsini Djelantik yang telah menjadi dosen pembimbing penulis selama kurang lebih satu semester ini, terimakasih atas bimbingan dari ibu yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis dan memberikan segala saran terbaik bagi penulisan skripsi yang disusun oleh penulis ini. Mohon maaf penulis haturkan kepada Mbak Sukewarsini apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan yang terdapat dalam skripsi penulis, Mbak telah mengajari dan membantu banyak hal bagi penulis dalam terselesaikannya skripsi ini, penulis sangat bersyukur bisa dibimbing oleh Mbak Suke karena

banyak belajar dan Mbak suke pokonya terbaik! Semoga ibu selalu diberikan semangat dalam membimbing mahasiswa/i lainnya.

4. Terimakasih untuk Fahmy Yudha Kuswanto yang selalu ada untuk penulis, mengetahui perjalanan penulis, selalu sayang penulis. Pokonya sayang mayang.

5. Terimakasih untuk Nadhifa Imara yang selalu mengingatkan aku untuk skripsian, makasih ya my day 1. Dari awal kuliah sampe terakhir tau banget perjalanan aku gimana, seneng dan bersyukur banget bisa kenal nanad, sayang nanadku.

6. Terimakasih untuk Chindy, Shalma, Alia, Cisalnasliku seperjuangan banget dari jaman SMA sampe kuliah semester akhir sampe detik ini selalu ada, support aku ngerjain skripsi, semangatin aku dan yakinin aku kalo aku bisa aaaa sayang kalian.

7. Terimakasih utk sahabat kecilkuu Aini dan Inten yang ga pernah cape sama aku sampe sekarang, dari kecil sampe dewasa, dari ga tau apapun sampe tau, pokonya so lucky to have u both.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR AKRONIM	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Pustaka	8
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1. Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS (IFJ) DAN KEBEBASAN JURNALIS DI TURKI	23
2.1 Kondisi Pers di Turki pada Masa Demonstrasi dan Kudeta di Tahun 2012- 2016	24
2.2 Gambaran Umum International Federation Of Journalists (IFJ)	35
2.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan IFJ Secara Umum	38
BAB III UPAYA IFJ DALAM MENDORONG KEBEBASAN JURNALISME DI TURKI	44
3.1 International Federation of Journalists Sebagai Pelaksana Dalam Terciptanya Kebebasan Jurnalisme di Turki	46
3.1.1 Menggalang Dana Solidaritas untuk Dana Keselamatan IFJ dalam Membantu Kebebasan Jurnalisme di Turki	47

3.2. IFJ Mengadvokasikan Perubahan dalam Kebebasan Jurnalisme di Turki dengan Melakukan Kampanye Menggunakan Tagar #Journalismisnotacrime ...	54
3.3 IFJ Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak dalam Melindungi Kebebasan Jurnalisme di Turki.....	67
3.3.1 Menerbitkan Laporan bersama Afiliasi IFJ untuk Mempublikasikan Kekerasan oleh Aparat Turki terhadap Jurnalis.....	69
3.3.2 Melaksanakan Konferensi Internasional untuk Menjamin Kebebasan Pers dan Hak Pekerja Jurnalis di Turki.....	73
BAB IV KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 1 Data Jurnalis Di Seluruh Dunia yang Meninggal Berdasarkan IFJ	43
Gambar 3.2 1 Kampanye IFJ di Akun Resmi Twitternya Pada Tanggal 1 Agustus 2016	57
Gambar 3.2 2 <i>Foto Kampanye oleh IFJ yang Disebarluaskan</i>	59
Gambar 3.2 3 Informasi Singkat Mengenai Kasus Pelanggaran Kebebasan Jurnalisme di Turki sebagai Bagian dari Kampanye IFJ dalam Situs Resminya.....	63
Gambar 3.2 4 Cuitan dari Partisipan Kampanye #Journalismisnotacrime.....	65
Gambar 3.2 5 Partisipasi Kampanye #Journalismisnotacrime oleh Media Deutsche Welle	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1 Nama-nama Wartawan yang Ditahan oleh Kepolisian Turki 6 Juli 2013	26
Tabel 3.3.1 1 Daftar Jurnalis yang Terkena Serangan oleh Aparat Turki saat Terjadinya Peristiwa Soma Mining	70

DAFTAR AKRONIM

AKP	<i>Adalalet ve Kalkinma Partis / Partai Keadilan dan Pembangunan</i>
CPJ	<i>The Committee to Protect Journalists</i>
EFJ	<i>European Federation of Journalists</i>
EJN	<i>The Ethical Journalism Network</i>
ETUC	<i>European Trade Union Confederation</i>
FAJ	<i>Federation of African Journalists</i>
FEPALC	<i>Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe</i>
IFJ	<i>International Federation of Journalists</i>
IOJ	<i>International Organization of Journalists</i>
IPI	<i>The International Press Institute</i>
ISP	Penyedia Layanan Internet
ITUC	<i>International Trade Union Confederation</i>
KCK/PKK	Persatuan Komunitas Kurdistan
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RSF	<i>Reporters without Borders</i>
TGC	<i>Türkiye Gazeteciler Cemiyeti / Asosiasi Jurnalis Turki</i>
TGS	<i>Türkiye Gazeteciler Sendikası / Persatuan Wartawan Turki</i>
TIB	Telekomunikasi İletişim Başkanlığı / Otoritas Telekomunikasi Turki
UNESCO	<i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring pesatnya perkembangan pers selalu didampingi dengan perkembangan teknologi informasi yang turut memadukan suatu informasi di dalamnya. Sehingga dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, akan memudahkan pers dalam mencari sebuah informasi untuk didapatkan dan dipublikasikan kepada khalayak umum. Pada intinya pers dan teknologi sebagai media pendukungnya harus sejalan dan searah, sehingga informasi yang didapat dan disampaikan akan tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan khalayak umum baik secara kecepatan dan keakuratan sesuai dengan realitas yang ada.

Terdapat sebuah lembaga yang mampu memberikan perlindungan dan menaungi seluruh keluhan pers untuk mendapatkan haknya ketika menjalani pekerjaannya, yaitu IFJ (*International Federation of Journalists*). Sebagai lembaga non-profit IFJ tidak berperan sebagai lembaga yang menyebarluaskan isu atau konflik yang terjadi antara keadaan jurnalis yang didiskriminasi di suatu negara atau apapun yang berkenaan dengan hak pers yang dirampas, melainkan lembaga tersebut membela para jurnalis dan melindungi para jurnalis yang sedang mengemban perannya sebagai pencari berita.

Upaya lembaga tersebut dapat terlihat di beberapa negara yang sedang mengalami hal tersebut yaitu dengan memberikan advokasi kepada para jurnalis

yang ditangkap atas berita yang tidak boleh dipublikasikan, memberikan surat teguran bagi pemerintahan negara yang berkaitan, dan mendatangi negara tersebut apabila tidak mendapatkan jawaban atau tindakan sesuai harapan yang berkenaan dengan jurnalis yang berada disana.

Kebebasan pers dan kebebasan ekspresi di Turki selama rentang tahun penelitian penulis banyak terdapat peristiwa yang menarik untuk di teliti dan memicu perdebatan dalam skala luas. Tidak hanya mengundang perdebatan bagi masyarakat Turki, namun juga dari negara-negara dunia lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh rangkaian peristiwa yang berdampak kepada masa depan jurnalisme di Turki atas adanya tekanan terhadap jurnalis dan memburuknya tindakan pemerintah Turki terhadap kebebasan media.

Pada awalnya Turki menikmati masa kebebasan pers di tahun 2002 hingga 2011 yang disebabkan oleh adanya liberalisasi terhadap undang-undang pers pada tahun 2004 oleh pemerintah Recep Tayyip Erdogan yang baru terpilih. Masa depan pers di Turki mulai terganggu pada tahun 2008-2010 atas adanya dugaan terhadap wartawan yang berupaya melakukan kudeta kepada pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Erdogan, serta propaganda teroris saat penyelidikan politik yakni Ergenekon dan KCK (Persatuan Komunitas Kurdistan yang mempunyai afiliasi dengan PKK), sementara operasi KCK diisinyalir menargetkan wartawan Kurdi dalam membantu menyebarkan propaganda dan kegiatan teroris.¹ Berdasarkan laporan dari UNESCO yang berjudul *“Pressing for Freedom: 20 Years of World Press Freedom Day”* pada tahun 2013

¹ Resource Centre on Media Freedom in Europe, “Media Freedom in Turkey.” Diakses pada 4 Juli, 2020. <https://www.rcmediafreedom.eu/Dossiers/Media-Freedom-in-Turkey>.

mempublikasi bahwa Turki menduduki daftar teratas yang memenjarakan sekitar 50 jurnalis mendahului Iran dan Tiongkok.²

1.2 Identifikasi Masalah

Kebebasan jurnalisisme dalam suatu negara merupakan masalah yang serius bagi sebuah negara demokrasi seperti Turki. Karena selain lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, pers, dan media merupakan salah satu penopang pilar di negara demokrasi yang berpengaruh bagi jalannya pemerintahan. Disadari atau tidak, jurnalis adalah representasi dari tim media dan pers yang merupakan aktor yang berperan penting dalam memberikan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Seiring perkembangan globalisasi yang diiringi munculnya konflik politik dan peperangan di dunia, keadaan para jurnalis juga semakin terancam dengan kondisi lapangan tempat mereka bekerja.

Tak jarang terjadi tindakan kekerasan, pelecehan, penyanderaan terhadap para jurnalis, bahkan sejak awal tahun 1990-an telah tercatat ribuan jurnalis meninggal saat sedang melaksanakan tugasnya. Dinamika kasus kekerasan bahkan pembunuhan yang cukup masif terhadap para jurnalis di dunia tentunya membutuhkan perhatian dari lembaga-lembaga dan otoritas internasional, guna menjamin hak-hak dasar dan keamanan para jurnalis saat bekerja.

Maka dengan adanya permasalahan yang pelik berkenaan dengan perlindungan bagi para jurnalis yang sedang mengemban tugasnya untuk mencari

² UNESCO, "Pressing for Freedom: 20 Years of World Press Freedom Day", The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2013, diakses pada 4 Juli 2020. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220525>, Hal 44.

suatu berita di sebuah negara, dan jurnalis tersebut mengalami penahanan agar tidak mempublikasikan berita tersebut, maka dengan adanya peran dari sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pelindung atau pembela yang dapat menyelamatkan para jurnalis atas penangkapan yang telah dilakukan dan hak kebebasan pers yang dirampas akan terselamatkan.

Dinamika kebebasan pers dan media di Turki semakin mencuat sejak tahun 2012 ketika Turki menahan beberapa jurnalis yang dianggap sebagai “benalu” bagi pemerintahan negara. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Turki telah resmi menjatuhkan vonis hukuman penjara bagi 76 jurnalis media nasional. Vonis ini tentunya menuai kecaman dari berbagai pihak, karena pemerintah dianggap terlalu memproteksi kebebasan pers. Selain IFJ, organisasi internasional lain yang merespon isu krisis pers di Turki adalah *Committee To Protect Journalists* (CPJ). Menurut laporan CPJ, pada tahun 2012 setidaknya 30 persen jurnalis nasional Turki dipenjara tanpa diadili oleh pemerintah. Hal ini juga lantas membuat image pemerintah seolah-olah buruk karena telah melakukan diskriminasi hukum terhadap kelompok jurnalis media nasional.³

Pasca AKP menjabat dalam rezim pemerintahan Turki, jurnalis yang terbunuh seharusnya semakin tereduksi, namun nyatanya, jumlah jurnalis yang terbunuh secara misterius terus bertambah. Sepanjang tahun 2015 hingga 2016 terdapat jurnalis terbunuh dalam isu politik dan kudeta Erdogan di Turki yang mencapai puncaknya hingga total 5 orang. Angka ini sekaligus berkontribusi

³ Tim CPJ, *Crisis In Turkey: The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing Dissent*, New York: *Committee to Protect Journalists*, 2012, Hal 6.

dalam memasukkan Turki dalam urutan kedua negara dengan perlakuan terburuk terhadap jurnalis pada tahun 2016. Pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2012 tidak segan-segan untuk menutup beberapa perusahaan media yang terlalu mengkritisi kinerja pemerintah. Erdogan juga seringkali melayangkan surat teguran bagi beberapa media dan menghimbau untuk segera memecat jurnalis atau wartawan yang terlalu kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah pusat.⁴ Tahun 2014 ketika Erdogan mulai memimpin Turki sebagai presiden, kebebasan pers semakin dikekang. Padahal pada tahun 2003 Turki telah menjamin eksistensi perlindungan hak-hak jurnalis dan media. Namun rezim Partai AKP (*Adalalet ve Kalkinma Partisi* / Partai Keadilan dan Pembangunan) yang dipimpin oleh Erdogan semakin mereduksi adanya kebijakan perlindungan hak-hak pers tersebut. Umumnya jurnalis yang ditangkap oleh negara adalah karena dianggap sebagai penyebar propaganda anti pemerintahan dan dianggap sebagai penyebar isu-isu sensitif seperti isu seputar etnis Kurdi di Turki.⁵

Pada tahun 2016, saat isu kudeta terhadap Erdogan terjadi, Turki kembali melakukan tindakan represifnya terhadap beberapa jurnalis media yang mencoba mengkritisi pemerintah Turki. Pasca peristiwa percobaan kudeta pada bulan Juli 2016, pemerintahan Erdogan setidaknya telah menangkap ratusan jurnalis yang diduga telah menyebarkan propaganda anti pemerintahan. Setelah tragedi ini, Turki kemudian ditetapkan sebagai negara terburuk bagi para jurnalis di dunia oleh IFJ.

⁴ Ibid.

⁵ Freedom House, "Turkey: Freedom of Pers 2016", Diakses pada 18 September, 2019. <https://freedomhouse.org/report/freedompress/2016/turkey>.

Urutan kedua negara terburuk bagi para jurnalis adalah Tiongkok, diikuti oleh Iran.

Sebagai salah satu organisasi non-profit yang bergerak dalam hal perlindungan jurnalis, IFJ tidak hanya membagikan data-data seputar isu-isu yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif yang dialami para jurnalis di Turki, melainkan juga turut andil dalam membela dan melindungi para jurnalis nasional di Turki. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh IFJ terkait kasus yang menimpa beberapa jurnalis di Turki adalah memberikan bantuan berupa upaya advokasi bagi para jurnalis yang ditangkap, mengirimkan surat teguran terhadap pemerintah Turki dan upaya-upaya konkret lainnya. Upaya-upaya IFJ inilah yang selanjutnya akan penulis deskripsikan dalam penelitian ini.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada masalah bagaimana upaya organisasi non-pemerintah *International Federation of Journalists* (IFJ) dalam melindungi kebebasan jurnalis di Turki dan upaya IFJ terhadap pemerintah Turki dalam membebaskan pers dan media Turki. Penulis akan berfokus pada tahun 2012-2016. Ditahun 2012 isu kebebasan jurnalis mencuat karena adanya permasalahan kesetaraan *gender* pada wartawan wanita. Tahun 2013 peristiwa krusial di Turki terkenal dengan sebutan *Gezi Park* terjadi demo besar-besaran terhadap pemerintah Turki karena penggusuran lahan taman Gezi. Berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2013, banyaknya wartawan yang mengalami kekerasan karena pemerintah tertutup dalam peliputan taman Gezi tersebut. Tahun 2014 terjadi peristiwa *soma mining* yaitu meledaknya perusahaan tambang karena

kelalaian lisensi dari pemerintah terhadap keamanan para penambang dan gagalnya operasi penyelamatan sehingga memakan 301 jiwa. Membuat masyarakat Turki berdemo selama 4 hari berturut-turut karena peristiwa tersebut. Karena peristiwa ini, banyak tindak kekerasan yang terjadi kepada jurnalis oleh aparat kepolisian. Tahun 2015 menjelang pemilihan presiden kasus kekerasan terhadap jurnalis semakin meningkat karena pemerintah semakin menutup diri untuk tidak di kritik untuk kepentingan pemilu tersebut. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun terparah bagi jurnalis-jurnalis di Turki yang mendapat opresi dari pemerintah. Puncak dari pembatasan terhadap jurnalis ini terjadi pada tahun 2016 dimana dilakukannya percobaan kudeta terhadap Presiden Turki Erdogan di dan media dikuasai seutuhnya oleh pemerintah.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka inti dari penelitian dapat dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut: **“Bagaimana Upaya *International Federation of Journalists (IFJ)* dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana peran lembaga IFJ memberikan bantuan perlindungan kebebasan pers pada jurnalisme di Turki yang hak-haknya dalam memberikan informasi dan berita dibatasi oleh pemerintah.

Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan sebelumnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana Turki sebagai negara demokrasi yang membatasi ruang gerak jurnalisme dalam mengkritik pemerintah. Selain itu penelitian ini berfokus pada IFJ sebagai organisasi non-pemerintah yang melindungi hak-hak jurnalis di Turki. Penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi untuk topik lain yang bersangkutan di masa yang akan datang.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam meneliti masalah ini, penulis menjadikan jurnal atau artikel sebagai acuan. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga sumber utama untuk dijadikan pedoman. Tulisan yang ada pada jurnal pertama membahas mengenai keadaan jurnalisme di Turki yang secara agresif menekan media dan kurang tegasnya hukum di Turki yang dapat menjamin kebebasan berekspresi. Jurnal kedua membahas mengenai hubungan antara masyarakat dengan NGO di era digital. Jurnal ketiga membahas mengenai pentingnya untuk melindungi kelangsungan hidup jurnalis yang seringkali bekerja dibawah tekanan maupun ancaman.

Jurnal oleh Yavuz Baydar (2013) Turkey's media: A Polluted Landscape.⁶

Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kebebasan media di Turki, baik dari sisi pemerintah Turki maupun penelitian yang dilakukan oleh NGO terkait dengan kondisi kebebasan media yang ada pada negara tersebut. Disebutkan bahwa adanya laporan dari NGO EFJ dan OSCE yang menyatakan bahwa Turki merupakan negara teratas sebagai negara yang menindas para jurnalis, hal tersebut disebabkan karena banyaknya jurnalis Turki yang ditahan. Laporan yang didapat dari NGO lainnya yakni *Freedom House* menyatakan bahwa Turki sebagai negara demokrasi hanya dapat merasakan sebagian dari demokrasi yang ada, hal tersebut dibantah oleh pemerintah Turki meskipun kementeriannya ada yang secara terbuka menyatakan bahwa terdapat masalah serius mengenai hukum terhadap kebebasan berekspresi di Turki.

Dalam jurnal ini disebutkan juga bahwa Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan seringkali mengajukan tuntutan terhadap jurnalis dan kartunis yang dianggap mencemarkan nama baik dirinya. Hal tersebut juga diikuti oleh adanya tindakan penyensoran sepihak kepada media besar di Turki setiap harinya, media besar dan jurnalis tidak dapat mempublikasikan investigasi atas kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Berita yang dianggap mengkritik pemerintah ataupun mengancam kepentingan beberapa pihak mendapat saringan, dikenakan sensor sepihak, atau bahkan tidak dipublikasikan sama sekali. Dalam

⁶ Yavuz Baydar, "Turkey's Media: a Polluted Landscape," *Index on Censorship* 42, no. 2 (2013): Hal 140-145, <https://doi.org/10.1177/0306422013489932>.

jurnal ini pun disebutkan juga bahwa pemerintah Turki secara agresif dan irasional menghancurkan media yang ada pada negaranya sendiri.

Jurnal oleh Kamil Demirhan (2013) Civil Society and NGOs on Digital Era in Turkey.⁷

Dalam jurnal ini membahas mengenai kaitan antara masyarakat sipil dan peran NGO di era digital yang difokuskan di Turki. Masyarakat sipil dianggap penting dalam memainkan perannya sebagai bagian proses pengambilan keputusan, termasuk juga organisasi non-pemerintah di Turki. Dalam era digital ini kehadiran NGO banyak menggunakan internet sebagai sarana untuk mempublikasikan ataupun menyukseskan kegiatan NGO tersebut. Disebut juga bahwa NGO merupakan bagian penting bagi masyarakat karena dapat perannya sebagai penyedia informasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu. NGO juga disebut sebagai aktor penting dalam menangani urusan global karena kapabilitasnya yang cukup kuat dapat menyelesaikan suatu isu karena bertindak di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Adapun yang menjadi fokus NGO baik mengenai hak asasi manusia, lingkungan, kesetaraan gender, dll. Dalam lingkup sosial dan politik, NGO seringkali dijadikan jembatan mediasi antara masyarakat dan pemerintah, menciptakan atau memobilisasi jaringan, mempengaruhi opini publik, dan sebagai pengawas bagi pemerintahan. Di Turki, peran NGO telah lama mempunyai dampak besar terhadap

⁷ Kamil Demirhan, "Civil Society and NGOs on Digital Era in Turkey." *Philippine social sciences and humanities review* 3(1): Hal 265-274, https://www.researchgate.net/publication/292397635_Civil_Society_and_NGOs_on_Digital_Era_in_Turkey

perkembangan masyarakat sipil di Turki dan mempengaruhi jalannya demokrasi di Turki. Sayangnya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yakni terbatasnya partisipasi masyarakat, keuangan yang terbatas karena rendahnya jumlah donor, terbatasnya jumlah sukarelawan dan tenaga profesional di suatu NGO, serta masih adanya kesenjangan perlindungan hukum terhadap NGO.

Jurnal oleh Christof Heyns dan Sharath Srinivasan (2013) Protecting the Right to Life of Journalists: The Need for a Higher Level of Engagement.⁸

Dalam jurnal ini membahas mengenai peran jurnalis yang memiliki tugas penting dalam pembinaan masyarakat melalui diskusi terbuka dan pencarian fakta. Dengan adanya hal tersebut jurnalis seringkali bekerja dalam keadaan bahaya, dalam jurnal inipun dipaparkan adanya serangan yang membahayakan nyawa jurnalis selama dua dekade terakhir dan perlunya mengkaji mengenai kerangka hukum dan perlindungan terhadap jurnalis. Meningkatnya kekuatan informasi di zaman modern ini, wartawan seringkali berhadapan dengan tindakan penyensoran atas pekerjaan yang dijalani, bahkan wartawan kerap kali mendapat teror baik itu kekerasan fisik, ancaman, penculikan, bahkan ancaman kematian. Hal tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengintimidasi jurnalis saat melakukan pekerjaannya. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa sifat ancaman yang dihadapi wartawan perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari otoritas yang lebih tinggi seperti hukum nasional bahkan internasional untuk menjamin jurnalis atau wartawan dalam menjalankan pekerjaannya. Tidak hanya otoritas tinggi yang

⁸ Christof Heyns and Sharath Srinivasan, "Protecting the Right to Life of Journalists: The Need for a Higher Level of Engagement," *Human Rights Quarterly* 35, no. 2 (2013): Hal. 304-332, <https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0030>.

harus ikut andil dalam melindungi jurnalis, tetapi peran publik perlu memposisikan dirinya dalam mengutuk segala eksekusi atau ancaman terhadap jurnalis dan menekankan mengenai pentingnya kehadiran jurnalis di masyarakat. Pihak pengadilan negara pun perlu memposisikan dirinya sebagai pihak yang independen, tanpa adanya ancaman ataupun segala tekanan dalam proses investigasi ancaman terhadap jurnalis. Sebagai penutup, dalam jurnal ini disebutkan bahwa pentingnya keselamatan jurnalis perlu dilindungi karena berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Keberhasilan suatu negara dalam melindungi jurnalis dapat terlihat sejauh mana negara tersebut dapat menjamin mengenai kebebasan ekspresi dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan dari tiga penelitian berbentuk jurnal terdahulu yang telah dibaca oleh penulis, terlihat bahwa belum ada penelitian yang mengangkat isu mengenai perlindungan kebebasan jurnalis di Turki oleh NGO yakni IFJ, sehingga belum ada penelitian yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan. Ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat menjadikan acuan dan dapat mendukung penelitian penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah penulis ajukan dengan menggunakan metode kualitatif.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan lebih dahulu menjabarkan menjelaskan mengenai paradigma, teori, konsep atau pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis, memberikan definisi dari kata upaya, dan

menjelaskan mengenai organisasi non-pemerintah sebagai objek yang akan diteliti oleh penulis.

Hubungan internasional merupakan sebuah ilmu yang dinamis. Hubungan ini memiliki banyak interaksi yang dilakukan oleh para aktor, dan aktor dalam hubungan internasional juga beragam. Pada awal kemunculannya, hubungan internasional hanya berfokus pada satu aktor utama saja yaitu negara. Namun seiring berjalannya waktu, aktor dalam dunia internasional menjadi semakin banyak dan kemunculannya tidak bisa diabaikan. Dalam perkembangannya, aktor yang tadinya hanya negara menjadi semakin beragam dengan adanya *MNC*, Organisasi Internasional, media, hingga individu pun mampu menjadi aktor dalam hubungan internasional. Hal tersebut menyebabkan hubungan yang ada didalamnya pun menjadi semakin kompleks dan pola hubungannya pun menjadi berubah.

Pertama-tama penulis akan menggunakan cara pandang dari paradigma Liberalisme untuk membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, Liberalisme pada umumnya mempunyai pandangan positif terhadap sifat manusia dengan mempunyai keyakinan bahwa setiap individu itu rasional dan memiliki kepribadian kooperatif baik dalam interaksi sosial maupun dalam tingkatan internasional, sehingga kerjasama yang menguntungkan antar individu yang ada di dalam negara hingga melewati batas negara atau internasional bisa tercapai.⁹ Liberalisme pun mempercayai bahwa negara bukan aktor utama ataupun satu-

⁹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations, Theories and Approaches Fifth Edition*, Oxford University Press, 2013. Hal 100.

satunya dalam hubungan internasional, peranan aktor non-pemerintah pun dibahas dalam Liberalisme baik itu individu ataupun kolektif.¹⁰

Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat empat pemikiran utama dari Liberalisme, diantaranya adalah *Sociological Liberalism*, *Interdependence Liberalism*, *Institutional Liberalism*, dan *Republican Liberalism*.¹¹ Dari keempat pemikiran utama liberalisme tersebut, penulis akan menggunakan Teori Liberalisme Sosiologis sebagai teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis. Liberalisme Sosiologis mempunyai pandangan bahwa hubungan internasional tidak hanya membicarakan mengenai hubungan antar negara, namun adanya hubungan transnasional antara orang, kelompok, dan organisasi sehingga liberal sosiologis menyatakan bahwa hubungan antar manusia lebih kooperatif dan lebih mendukung atas terciptanya kedamaian daripada antar pemerintah nasional.¹²

Rosenau pun menyatakan pendapatnya bahwa fokus dari liberalisme sosiologis adalah pada hubungan transnasional di tingkatan individu yang dianggap penting dalam menangani urusan global, hal ini disebabkan karena individu semakin baik dalam memperoleh akses pendidikan dan memperluas kegiatannya dalam bidang komunikasi secara elektronik untuk mempermudah adanya kegiatan tukar informasi antar individu, kapasitas negara atas kontrol dan

¹⁰ Roland Pierik dan Geoffrey Gordon, "Liberal Political Philosophy: The Role of Non-State Actors and Considerations of Global Justice." Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2016-51, General Subserie Research Paper No. 2016-06, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1719981. Hal 1.

¹¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations, Theories and Approaches Fifth Edition*, Oxford University Press, 2013. Hal 102-117.

¹² *Ibid*, Hal 103.

regulasi yang tereduksi atas keadaan dunia yang semakin kompleks.¹³ Selain dengan menekankan terhadap kerjasama internasional dan kerjasama yang saling menguntungkan, Liberalisme pun mengakui adanya organisasi internasional dan aktor non pemerintah untuk menjadi preferensi negara dalam pemilihan suatu kebijakan, NGO merupakan salah satunya.¹⁴ Merujuk kepada pertanyaan penelitian penulis yang akan menjelaskan mengenai upaya NGO maka penting untuk terlebih dahulu mengartikan definisi dari upaya itu sendiri yang diambil melalui KBBI, upaya diartikan sebagai usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud baik itu persoalan ataupun jalan keluar.¹⁵

NGO menurut McGann & Johnstone adalah organisasi non pemerintah yang dikenal sebagai “organisasi swasta sukarela”, “organisasi masyarakat sipil”, dan “organisasi nirlaba”.¹⁶ Peter Hall Jones menyebutkan bahwa NGO menggambarkan kegiatan serangkaian kelompok dari organisasi yang mempunyai kegiatan sebagai pengawas dan lembaga bantuan hingga organisasi yang memiliki fungsi pembangunan dan kebijakan, serta didefinisikan sebagai organisasi yang lebih berfokus terhadap agenda kepentingan publik daripada kepentingan komersial.¹⁷

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian penulis akan menggunakan konsep peran NGO menurut Lewis dan Kanji, dalam bukunya

¹³ Ibid, Hal 104.

¹⁴ Eric Shiraev, *International Relations*, Oxford University Press, 2014. ISBN-13: 978-0190454357. Hal 80.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Upaya.” Diakses pada 8 Juli 2020, <https://kbbi.web.id/upaya>

¹⁶ James McGann and Mary Johnstone, “The Power Shift and the NGO Credibility Crisis.” *International Journal of Not for Profit Law*, 2006, <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/176/31423.html>, Hal 65-77.

¹⁷ Scott T. Young dan Kanwalroop Kathy Dhandra. *Sustainability: Essentials for Business*,. Thousand Oaks: SAGE, 2013. Hal 221.

yakni *Non-Governmental Organization and Development* menyatakan bahwa kegiatan NGO dapat dikategorikan menjadi tiga yakni sebagai *implementers*, *catalyst*, dan *partners*. Dalam menjalankan perannya yang pertama yakni *implementer* atau pelaksana, kegiatan yang termasuk didalamnya berupa mobilisasi sumber daya dalam bidang barang dan jasa kepada orang atau kelompok yang membutuhkan contohnya seperti perawatan kesehatan, keuangan mikro, dan agrikultur.¹⁸

NGO sebagai organisasi non-pemerintah menjalankan fungsi keduanya yakni katalis yang mempunyai makna sebagai fasilitator ataupun kontribusinya sebagai agen pembawa perubahan baik itu dalam bentuk pemikiran atau pendorong dalam memobilisasi suatu tindakan yang diarahkan kepada individu, kelompok, komunitas lokal, maupun pemerintah dengan melakukan tindakan pemberdayaan, lobi dan advokasi, menyebarluaskan penelitian, dan upaya untuk mempengaruhi proses suatu kebijakan.¹⁹

Fungsi sebagai mitra kerjasama atau *partnership* ialah untuk memulai bekerjasama dengan pihak lain baik itu pemerintah, lembaga donor, sektor swasta untuk memberikan input dan melaksanakan program antar lembaga yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sebagai NGO, kemitraan yang dijalani pun ditujukan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, efektif, serta responsif.²⁰

¹⁸ Davis Lewis dan Nazeen Kanji, *Non-Governmental Organization and Development*, Routledge 2009, Hal 13.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Konsep kedua yang akan penulis gunakan dalam menjawab penelitian ini adalah upaya NGO menurut Karns dan Mingst yang menjelaskan mengenai sembilan upaya NGO sebagai aktor non-negara. Dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, Karns dan Mingst menyatakan bahwa sembilan upaya dari NGO adalah mengumpulkan dan mempublikasikan sejumlah informasi dan data-data penting, membingkai sebuah masalah untuk konsumsi publik, membuat dan memobilisasi jaringan dalam masyarakat, meningkatkan partisipasi publik untuk dapat terlibat dalam suatu isu, mendukung adanya perubahan dalam sebuah tata kelola suatu kebijakan, mempromosikan norma-norma baru dalam masyarakat, NGO juga turut memantau norma-norma Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sosial.²¹

NGO pun turut berpartisipasi dalam konferensi global untuk membawa suatu isu, mengirimkan laporan, serta turut untuk membentuk pandang baru dalam melihat permasalahan, terakhir dari sembilan upaya NGO adalah untuk mempengaruhi pemerintah agar pendapatnya dapat didengar dan meninjau ulang kebijakan sebagai respon terhadap isu yang tengah menjadi satu fokus NGO tersebut.²²

Dalam Hubungan Internasional terdapat banyak aktor yang ada di dalamnya, selain NGO terdapat juga aktor lain yang memiliki kegiatan serupa yakni INGO. Perbedaan antara keduanya terletak pada definisi dan cakupan kegiatan yang dilakukan. Menurut Bank Dunia, NGO didefinisikan sebagai

²¹ Margaret Karns, Karen Mingst, dan Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, London: Lynne Renner Publishers, 2015. Hal 242.

²² Ibid.

organisasi swasta yang memiliki tujuan untuk meringankan masalah dan memperjuangkan kepentingan suatu kelompok yang membutuhkan, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial secara dasar, dan melakukan kegiatan untuk membuat masyarakat agar berkembang.²³

NGO bersifat formal, swasta, tidak bertujuan komersial (nirlaba), mempunyai pemerintahan sendiri, dan berisi sukarelawan.²⁴ Selain itu, kegiatan NGO meliputi transformasi sosial, mendorong demokrasi, penyelesaian konflik dan memperjuangkan HAM, serta melakukan analisis kebijakan beserta penelitian.²⁵ Sedangkan INGO memperluas konsep organisasi non-pemerintah atau NGO ke dalam lingkup internasional, sehingga memiliki jangkauan program global yang luas sebagai hasil dari keanggotaan dalam konfederasi secara global.²⁶ INGO pun di definisikan sebagai organisasi yang beroperasi secara internasional yang tidak didirikan oleh perjanjian antar pemerintah.²⁷

²³ World Bank, "Working with NGOs: A Practical Guide to Operational Collaboration between The World Bank and Non-governmental Organizations." Operations Policy Department, World Bank Maret 1995, diakses pada 2 Agustus 2020, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/pdf/multi-page.pdf>

²⁴ Anna C. Vakil, "Confronting the Classification Problem: Toward a Taxonomy of NGOs," *World Development* 25, no. 12 (1997): pp. 2057-2070, diakses pada 3 Agustus 2020, [https://doi.org/10.1016/s0305-750x\(97\)00098-3](https://doi.org/10.1016/s0305-750x(97)00098-3). Hal 2059.

²⁵ Tullia Hamilton et al., "Nongovernmental Organizations, Definition and History," *International Encyclopedia of Civil Society*, 2010, pp. 1056-1062, diakses pada 3 Agustus 2020, https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_3.

²⁶ UNDP, "An Overview of International NGOs In Development Cooperation." Diakses pada 3 Agustus 2020, <https://www.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH11%20An%20Overview%20of%20International%20NGOs%20in%20Development%20Cooperation.pdf>

²⁷ Resolusi ECOSOC No. 288 (x) 27 Februari 1950.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang mencari dan mengumpulkan data yang kemudian diorganisir untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian tanpa mengesampingkan data yang bersifat angka dalam memenuhi substansi yang diperlukan pada penelitian.²⁸ Metode penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam bentuk bacaan atau teks maupun gambar.²⁹ Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.³⁰

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.³¹ Maka dari itu peneliti akan menggunakan referensi dari buku, jurnal, *website*, sumber dari pemerintah maupun non-pemerintah. Sebelum dianalisis, seluruh data yang digunakan akan diseleksi terlebih dahulu dan dikomparasikan agar sesuai dengan

²⁸ Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal 28.

²⁹ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (California: Sage Publication, 2009). Hal 174.

³⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, cet ke 7, 1996), Hal 3.

³¹ Dr.Harnovinsah, Ak. "Metodologi Penelitian" Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana. Hal 1.

penelitian penulis.³² Penulis akan menggunakan data-data yang relevan yang mayoritas didapat dari *website* resmi *International Federation of Journalists* (IFJ) dan data pendukung dari jurnal lainnya yang membahas mengenai kebebasan jurnalisme di Turki.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab 1 – Pendahuluan dalam bab ini penulis berusaha untuk menjelaskan rancangan penelitian yang dibahas dalam beberapa bagian, yang pertama adalah bagian latar belakang masalah yang berisi mengenai pemahaman awal terhadap topik yang hendak penulis teliti, penulis juga akan memberi pemahaman lebih lanjut pada bagian identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang berisikan pertanyaan penelitian yang akan penulis jawab yakni “Bagaimana Upaya-upaya *International Federation of Journalists* (IFJ) dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki?” setelah mengetahui rumusan masalah, penulis akan lanjut kepada tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang memakai Teori Liberalisme Sosiologis, Konsep Peran NGO milik Lewis dan Kanji, dan konsep upaya NGO menurut Karns dan Mingst, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku, artikel, jurnal, serta laporan dari NGO yang dipublikasikan secara daring, terakhir penulis akan membahas mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2007), Hal 9.

BAB II – INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS (IFJ) DAN KEBEBASAN JURNALIS DI TURKI

Dalam bab ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran berupa data bagi lembaga yang bergerak dalam perlindungan jurnalis dunia yakni *International Federation Of Journalists* (IFJ) dan krisis pers di Turki yang menyebabkan adanya gangguan atas kebebasan pers di negara tersebut. Dalam bab II ini penulis akan membaginya menjadi tiga sub-bab:

2.1 Kondisi Pers di Turki pada Masa Demonstrasi dan Kudeta di Tahun 2012-2016

2.2 Gambaran Umum International Federation Of Journalists (IFJ)

2.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan IFJ Secara Umum

Bab III – ANALISA UPAYA IFJ DALAM MENDORONG KEBEBASAN JURNALISME DI TURKI TAHUN 2012-2016

Dari pemaparan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bab III ini akan memaparkan upaya yang dilakukan oleh IFJ dalam mendorong kebebasan jurnalisme di Turki pada tahun 2012-2016 yang terganggu atas adanya serangkaian demonstrasi dan kudeta pada pemerintahan Erdogan. Penulis akan membagi bab ini menjadi tiga sub-bab:

3.1 Peran International Federation of Journalists Sebagai Pelaksana Dalam Terciptanya Kebebasan Jurnalisme di Turki

3.1.1 Menggalang Dana Solidaritas untuk Dana Keselamatan IFJ
dalam Membantu Kebebasan Jurnalisme di Turki Pada Tahun 2016

3.2 IFJ Mengadvokasikan Perubahan dalam Kebebasan Jurnalisme
di Turki Tahun 2012-2016

3.2.1 Melakukan Kampanye Menggunakan Tagar
#Journalismisnotacrime

3.3 IFJ Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak dalam Melindungi
Kebebasan Jurnalisme di Turki

3.3.1 Menerbitkan Laporan bersama Afiliasi IFJ untuk
Mempublikasikan Kekerasan Aparat Turki terhadap Jurnalis

3.3.2 Melaksanakan Konferensi Internasional untuk Menjamin
Kebebasan Pers dan Hak Pekerja Jurnalis di Turki

Bab IV – Kesimpulan dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan analisis terhadap data, teori, dan konsep yang telah digunakan. Serta penulis akan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya mengenai upaya IFJ dalam melindungi kebebasan jurnalisme di Turki.